



KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029, Perubahan Kedua RUU pada Prolegnas Prioritas Tahun 2025, dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 menyetujui untuk menyepakati:

1. Memasukkan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang usulan Badan Legislasi DPR RI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi ke Daftar Perubahan Kedua Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) RUU beserta 5 (lima) Daftar RUU Kumulatif Terbuka.
2. mengeluarkan 4 (empat) rancangan undang-undang usulan DPR (Badan Legislasi) dari Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (No.4);
 - b. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (No. 21);
 - c. RUU tentang Patriot Bond/RUU tentang Surat Berharga (No. 36); dan
 - d. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (No. 37);

dan memasukkan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang usulan Badan Legislasi DPR RI yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sanitasi dan Air Minum, serta 1 (satu) Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang semula usulan Anggota

menjadi usulan Badan Legislasi DPR RI, ke Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026,

3. mengeluarkan 2 (dua) rancangan undang-undang usulan Pemerintah dari Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026, yaitu: RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (No.61) dan RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah (RUU tentang Penyesuaian Pidana), Nomor 58.

sehingga RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2026 berjumlah 63 (enam puluh tiga) RUU beserta 5 (lima) Daftar RUU Kumulatif Terbuka.

Jakarta, 27 November 2025

**Badan Legislasi DPR RI
Ketua,**

DR. BOB HASAN, SH., MH.

**Kementerian Hukum RI
Wakil Menteri,**

**PROF. DR. OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H.,
M.HUM**

**Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI
Ketua,**

DR. H. ABDUL KHOLIK, S.H., M.Si.